

**EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROGRAM BINA
LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh
TIARA DHAYU PRAMESWARI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Tiara Dhayu Prameswari

Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan diatur dalam Perda Nomor 01 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Perwali Nomor 49 tahun 2013 tentang PPDB. Namun pada implementasinya timbul berbagai macam permasalahan yaitu penetapan kuota penerimaan peserta didik bina lingkungan tidak sesuai dengan perda, terjadi ketimpangan kuota penerimaan antara sekolah favorit dan biasa, serta belum mengakomodir kebutuhan siswa miskin sehingga kebijakan tersebut perlu dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencapaian dan faktor ketidakberhasilan pencapaian implementasi kebijakan. Tipe penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 6 informan dan menyebarkan kuesioner pada 83 responden yang terdiri dari 28 responden Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 22 responden guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung dan 33 responden wali murid bina lingkungan kelas VII SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung dengan teknik *sampling* jenuh yaitu sampel populasi.

Hasil penelitian menunjukkan jika 68 responden masuk dalam kategori positif yang berarti hasil evaluasi implementasi pada *input*, proses maupun *output* kebijakan sebagian besar sudah tercapai. Salah satu pencapaian pada *output* kebijakan adalah kebijakan tersebut telah efektif karena mengurangi angka putus sekolah di Kota Bandar Lampung. Namun sebanyak 15 responden masuk dalam kategori negatif disebabkan oleh *input* dari penetapan jumlah kuota penerimaan peserta didik tidak efektif karena tidak diatur menggunakan regulasi yang jelas sehingga terjadi tumpang tindih antara perda dan perwali. Hal tersebut menyebabkan *output* pencapaian kuota penerimaan peserta didik bina lingkungan tidak efektif karena tidak sesuai dengan perda. Selain itu, proses implementasi kebijakan tersebut belum efektif karena banyak permasalahan yang terjadi, diantaranya yaitu menurunnya mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung khususnya di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung karena motivasi dan prestasi belajar siswa bina lingkungan yang masih rendah.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pendidikan, Bina Lingkungan.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE EDUCATION POLICY COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMIN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By:

Tiara Dhayu Prameswari

Education policy program community development for Perda No 01 Th 2012 about the Realization of Education and perwali No 49 Th 2013 about the PPDB. However, in the implementation of various kinds of problems arise, namely the determination of the quota admissions learners community development does not comply with the quota change, occurring imbalances between the school reception favorite and unusual, and and yet meet the needs of poor students so that the policy needs to be evaluated. This study aims to describe the achievement and attainment of an unsuccessful implementation of policy. This type of research is quantitative descriptive. Data collection was conducted through interviews with 6 informant questionnaire on 83 and spread responden which consists of 28 respondents from the Department of Education and Culture, 22 respondents teacher at SMPN 2 and in SMPN 22 Bandar Lampung and 33 respondents caregivers Class VII in SMPN 2 and in SMPN 22 Bandar Lampung with saturated sampling techniques or sampling population.

The results of the research showed if 68 respondents fall into the category of positive which means implementation evaluation results on the input, process as well as the output policy is largely already achieved. One of the achievements in the output policy is the policy has reduced the numbers dropping out of school in the city of Bandar Lampung. But as many as 15 respondents fall into the category of negative because of the input of the number of admissions quota assignment learners not set using a clear regulation which overlap between local regulations and rules of the Mayor. It also results in the output quota attainment the learners community acceptance does not comply with the change. In addition, negative response is also caused by the decrease in the quality of education in the city of Bandar Lampung in SMPN 2 and in SMPN 22 Bandar Lampung because motivation and learning achievements of students of community development which is still low.

Keywords: Evaluation, Policy, Education, Community Development.

**EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROGRAM BINA
LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
TIARA DHAYU PRAMESWARI**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
PROGRAM BINA LINGKUNGAN DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Tiara Dhayu Prameswari**

No. Pokok Mahasiswa : **1316021080**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

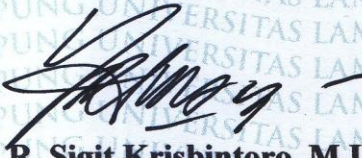
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Syarief Makhya**

Penguji : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : 28 Juli 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai *bahan acuan dalam naskah* dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Juli 2017
Yang Membuat Pernyataan,



Tiara Dhayu Prameswari
NPM. 1316021080

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Tiara Dhayu Prameswari.

Lahir di Gumawang pada Tanggal 18 Januari 1996 sebagai putri kedua dari pasangan Bapak Herlianto dan Ibu Fauziah.

Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, memiliki seorang kakak laki laki bernama Tofazh Yudha Wabera dan seorang adik laki-laki bernama Fhajar Rindang Buana. Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur lulus pada tahun 2001, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 4 Gumawang lulus pada tahun 2007. Setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belitang lulus pada tahun 2010 kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belitang lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus sebagai kewajiban studi, pada bulan Januari tahun 2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.

*Sebuah kado sederhana
kupersembahkan untuk
kedua orang tuaku
tersayang,
kedua saudaraku,
Keluarga Besar Nata
Muchsin dan Keluarga
Besar Supeno.*

*Allah akan meninggikan
Orang orang yang beriman diantaramu
Dan orang orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat
(Q.s. Al-Mujadalah: 11)*

*Kepada kedua
orangtuaku:*

*Maaf karena aku belum bisa
mengukir bahagia
di wajahmu,*

*Maaf karena belum bisa
menanam bangga
di
hatimu,*

*Maaf untuk semua air mata yang
engkau tumpahkan
karena aku,*

*Maaf karena belum mampu
menghapus beban
dari tubuh lelahmu,*

*Terimakasih
untuk cinta dan doa tulusmu
di setiap langkahku.*

MOTTO

*Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung
(QS 3: 173)*

*Mana mungkin Allah membiarkan tangan-tangan yang berdo'a
kepada-Nya kembali kosong.
(Anonim)*

*Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang kau harus terus bergerak.
(Albert Einstein)*

*Jika anda mendidik seorang pria, maka seorang pria akan menjadi terdidik. Jika anda mendidik seorang wanita, maka sebuah generasi akan terdidik.
(Tiara Dhayu Prameswari)*

*Siapaapun bisa menjadi apapun
(Tiara Dhayu Prameswari)*

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus selaku Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan serta saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Seluruh responden dan informan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Dewan Guru beserta staff di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung, Wali Murid Bina Lingkungan Kelas VII di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung, terimakasih atas informasi serta waktu yang diberikan.
6. Kedua orang tua yang telah menjadi inspirasi dan motivasi terbesar penulis, Fauziah (Ibuk) dan Herlianto (Ayah) yang telah menjadi orang tua terbaik di dunia. Terimakasih banyak atas segala dukungannya selama ini. Maaf masih menjadi beban kalian, tapi percayalah selalu ada bagian diri ini yang tidak pernah berhenti berjuang untuk membahagiakan kalian. Didikan dan semangat yang kalian berikan telah mengantarkan penulis hingga mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Unila. Gelar ini untuk kalian. Semoga Ibuk dan Ayah selalu sehat sehingga kebanggaan untuk menjadi alasan di balik senyuman kalian akan terus ada. Aamiin.
7. Kakakku Tofazh Yudha Wabera dan Adikku Fhajar Rindang Buana tetaplah menjadi kebanggaan keluarga. Terimakasih untuk semua motivasi, semangat dan keceriaan yang kalian berikan. Salah satu hal yang paling dinanti ketika pulang dan dirindukan ketika merantau adalah kehangatan dan senda gurau bersama kalian.
8. Abdul Aziz, S.E., si *partner in crime* terimakasih telah menjadi bagian cerita perjalanan panjang ini. Hidup ini keras namun anda lebih kuat.

Teruslah berusaha seberapa minimpun waktu tersisa, peluang selalu ada asalakan kamu tidak berhenti. Mungkin kamu akan berhasil, mungkin juga tidak. Peluangmu hanya akan menjadi nol jika kamu berhenti berusaha.

9. Rahmat Asnawi, S.H., teman yang menyadarkanku bahwa kalimat “semua akan indah pada waktunya” benar ada. Terimakasih untuk pelajaran berharga yang gak sengaja diberikan pada tanggal 28 Juli 2017, itu bersejarah wi.
10. Sahabat sabahat terbaik sepermainan dan sepergaulan Siti Nur Kholifah, S.Pd., Apsari Yunita, S.Pd., Yola Rovita, S.Pd., Hesti Puspitasari, S.Pd., Yunita Muthia Nurafifah, S.Pd, Eka Puji Lestari, S.E., Novi Windasari, S.E., terimakasih untuk semua kenangan dan momen berharga selama berjuang di tanah Lampung. Kalian para perempuan luar biasa. Semoga kelak kita akan di pertemukan ditempat yang terbaik.
11. Dua konco kenthel selama kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan Aziza Aulia Fahmi, S.IP., dan Maria Christina S.IP., gaktau mau nulis apa tapi dari awal semester 1 sampe sekarang kalian yang “*always listening always understanding*”. Terimakasih untuk kebersamaannya melewati suka duka dan menjadi pundak pundak yang begitu nyaman untuk disandarkan ketika beban dirasa tak tertahankan selama hampir 4 tahun ini. Gak ada kata menyesal kenal sama kalian, *i’am proud of you guys*.
12. Hesti Seftia Wulandari, S.IP., dan Lusita Anjelina., S.IP para pejuang pukul 7 Dekanat. Membuat yang kenal menjadi dekat. Kalian mengajarkanku bagaimana indahnya hasil yang tidak mengkhianati

proses.

13. Angkatan 2013 jurusan Ilmu pemerintahan saudara seperjuanganku Maria Christina, S.IP., Aziza Aulia Fahmi, S.IP., Ina Wijaya, S.IP., Dormatio Manik, S.IP., Yolanda Margaretha Silaen, S.IP., Restiani Damayanti, S.IP., Fina Ria Tisa, S.IP., Vivi Alvionita, S.IP., Kenn Sindy Kirana Julia, S.IP., Dwi Titiawati, S.IP., Bustanul Haimia, S.IP., Riski Atika Sari, S.IP., Lusita Anjelina, S.IP., Hesti Seftia Wulandari, S.IP., Agnessia Diknas Pitaloka, S.IP., Ipnika Nurfasari, S.IP., Nadia Maudyna, S.IP., Risky Nitha, S.IP., Putri Aphrodite, S.IP., Chici Afrianita, S.IP., Ocha Pawalin, S.IP., Rini Setiawati, S.IP., Defa Septia, S.IP., dan kawan-kawan seperjuangan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih untuk waktu dan kebersamaan selama ini semoga silaturahmi kita akan terus terjaga.
14. Teman sekelompok KKN Desa Pesawaran Indah CIBON LOVER'S selama 60 hari Bang Adib, Bang Ahmad, Suci, Uwik dan Kekek. Pilihannya minum air segelas atau makan basreng sebungkus!.. *Good luck guys*, semoga silaturahmi ini akan tetap terjaga bukan hanya sebatas 60 hari saja.
15. Para Gadis Penghuni Asrama Masayu 1 : Apsari, Siti, Intan, Rofi, Yuni, Ayung, Mbak Eka, Mbak Desi, Aul, Yulia, Yunda, Miftah dan seluruh jajaran lainnya. Terimakasih untuk canda tawa dan keceriaannya, berkat kalian setidaknya penulis menjadi betah tinggal diperantauan.
16. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat dituliskan satu persatu,

penulis mengucapkan terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti semuanya sebagai amal sholeh. Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 28 Juli 2017

Tiara Dhayu Prameswari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kebijakan Publik.....	12
B. Tinjauan tentang Evaluasi Kebijakan	15
C. Konsep Kebijakan Pendidikan.....	21
D. Tinjauan tentang Program Bina Lingkungan.....	23
E. Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Sumber Data	30
D. Definisi Konseptual	32
E. Definisi Operasional	32
F. Dimensi Dimensi Evaluasi Kebijakan	34
G. Populasi, Teknik Sampling dan Sampel	35
H. Teknik Pengumpulan Data	40
I. Teknik Pengolahan Data	43
J. Teknik Analisis Data.....	44
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil SMPN 22 Bandar Lampung.....	47
B. Profil SMPN 2 Bandar Lampung.....	52
C. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	56
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan	61

B. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan.....	64
C. Analisis Data.....	126

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	154
B. Saran	157

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu.....	9
2. Sumber Data Primer Penelitian	30
3. Sumber Data Sekunder Penelitian	31
4. Definisi Operasional Variabel	33
5. Evaluasi Berdasarkan Dimensi Evaluasi Implementasi	35
6. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	36
7. Jumlah Guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017	37
8. Jumlah Wali Murid Biling kelas VII SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017	37
9. Jumlah Populasi	39
10. Jumlah Sampel.....	40
11. Pelaksanaan Penelitian melalui Kuesioner	41
12. Pelaksanaan Penelitian melalui Wawancara.....	42
13. Identitas Responden menurut Jenis Kelamin.....	64
14. Identitas Responden menurut Umur	65
15. Identitas Responden menurut Agama.....	66
16. Identitas Responden menurut Pendidikan	67
17. Identitas Responden menurut Suku	68
18. Hasil Pernyataan Responden mengenai Penetapan Kuota Penerimaan Peserta Didik Biling Tidak Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yaitu Sebesar 30%.....	70
19. Hasil Pernyataan Responden mengenai Anggaran yang diberikan Pemerintah Sudah Memadai untuk Membiayai Operasional Pelaksanaan Program Biling	74
20. Hasil Pernyataan Responden mengenai Banyak Permasalahan yang Muncul dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Biling di Kota Bandar Lampung (Khususnya di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung)	79
21. Hasil Pernyataan Responden mengenai Pemasangan Spanduk dan Banner pada Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Menarik Perhatian dan Minat Kelompok Sasaran	84
22. Hasil Pernyataan Responden mengenai Proses <i>Home Visit</i> yang dilakukan Panitia Pelaksana Sudah dilakukan dengan Objektif	

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.....	88
23. Hasil Pernyataan Responden mengenai Panitia Pelaksana Melayani Kelompok Sasaran Sesuai dengan Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Bina Lingkungan	93
24. Hasil Pernyataan Responden mengenai Sering Terjadi Masalah Ketimpangan Antara Kuota Biling Guru dan Biling Murni di Sekolah Favorit dan Sekolah Biasa (Khususnya di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung)	96
25. Hasil Pernyataan Responden mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan Telah Berhasil Mengurangi Angka Putus Sekolah dengan Memberikan Kesempatan Kepada Calon Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu untuk Memperoleh Pendidikan di Kota Bandar Lampung.....	101
26. Hasil Pernyataan Responden mengenai Mutu Pendidikan di Kota Bandar Lampung Menurun Semenjak diselenggarakannya Program Bina Lingkungan (Khususnya di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung).....	105
27. Hasil Pernyataan Responden mengenai Pencapaian Kuota Penerimaan Peserta Didik Biling Sesuai dengan Target yang telah ditentukan dalam Perda No 01 Tahun 2012 yaitu Sebesar 30%.....	108
28. Hasil Pernyataan Responden mengenai Peserta Didik yang diterima Melalui Jalur Bina Lingkungan telah Sesuai dengan Aturan Rayonisasi	112
29. Hasil Pernyataan Responden mengenai Kegiatan Sosialisasi dan <i>Home Visit</i> yang dilakukan oleh Aktor Pelaksana Berjalan dengan Efisien dilihat dari Segi Hasil, Waktu dan Biaya	117
30. Hasil Pernyataan Responden mengenai Kebijakan Program Bina Lingkungan Sudah Memenuhi Kebutuhan Kelompok Sasaran.....	120
31. Hasil Pernyataan Responden mengenai Penerimaan Kelompok Sasaran Melalui Kuota Biling Guru serta Biling Murni pada Sekolah Favorit dan Sekolah Biasa telah didistribusikan Secara Merata (Khususnya di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung)	123
32. Interval Komponen Evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dari Segi Evaluasi <i>Input</i>	130
33. Interval Komponen Evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dari Segi Evaluasi Proses	136
34. Interval Komponen Evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dari Segi Evaluasi <i>Output</i>	143
35. Evaluasi Responden secara Keseluruhan.....	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	27
2. Sebaran Jawaban Responden dari Aspek Evaluasi <i>Input</i>	128
3. Sebaran Jawaban Responden dari Aspek Evaluasi Proses.....	134
4. Sebaran Jawaban Responden dari Segi Evaluasi <i>Output</i>	141
5. Rekapitulasi Evaluasi secara Keseluruhan.....	151

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan variabel penting dalam membangun bangsa. Berbagai masalah dan tantangan dalam dunia pendidikan sejauh ini dapat di atasi pemerintah dengan melahirkan berbagai kebijakan dan program yang bisa mengurangi masalah secara bertahap, seperti masalah mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, relevansi, efektivitas dan efisiensi pendidikan. Amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan jika kebijakan pendidikan Indonesia bersifat desentralistik. Namun, persoalan mendesak yang dihadapi dalam pendidikan nasional Indonesia justru adalah belum meratanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib berupaya untuk memenuhinya. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diberikan untuk anggaran pendidikan minimal sebesar 20%. Pemberian DAK merupakan komando dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu fokus program dalam pembangunan.

Akan tetapi realisasinya menunjukkan bahwa saat ini belum semua warga negara memperoleh haknya atas pendidikan. Menyikapi hal tersebut, sebagai wujud konsistensi dalam menyelenggarakan pendidikan di daerah, pemerintah daerah di Indonesia membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan pendidikan gratis Program Bina Lingkungan, misalnya di Kota Mataram, Bekasi, Medan dan daerah lain di Indonesia. Khususnya di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat sebuah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota Bandar Lampung yang fokus pembangunannya diarahkan untuk peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan manajemen pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Walikota Bandar Lampung membuat kebijakan Program Pendidikan Bina Lingkungan. Program Bina Lingkungan merupakan bentuk kebijakan bidang pendidikan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait memberikan perluasan akses pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu di Kota Bandar Lampung. Sasaran Program Bina Lingkungan adalah peserta didik SD dan SMP sederajat.

Program tersebut bertujuan untuk pemerataan pendidikan bagi peserta didik miskin di Kota Bandar Lampung dengan memberikan kesempatan warga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Semenjak

ditetapkan kebijakan bina lingkungan, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat gencar melakukan sosialisasi Program Bina Lingkungan kepada warga. Media yang digunakan untuk sosialisasi berupa banner yang dipasang di tempat yang strategis dan disebar pada 20 kecamatan di Bandar Lampung.

Pelaksanaan kebijakan Program Bina Lingkungan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2013. Namun pada pelaksanaannya, produk hukum tersebut tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Akibatnya banyak peluang yang di manfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kecurangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung telah melakukan kesalahan dalam mengatur kuota peserta bina lingkungan. Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan ternyata melanggar Perda Nomor 01 Tahun 2012 terkait ketentuan kuota penerimaan peserta didik sebesar 30%.

Dasar hukum implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan apabila hanya berdasarkan pada peraturan walikota merupakan tindakan yang keliru karena regulasi yang mengatur persoalan tersebut telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 35 ayat 4 Perda Nomor 01 Tahun 2012 menyatakan jika daya tampung SD dan SMP sederajat adalah 70% siswa masuk melalui jalur regular dan 30% siswa masuk melalui jalur bina lingkungan. Namun, penetapan jumlah kuota pada setiap tahun terus mengalami peningkatan

dimana pada tahun 2014 sebesar 50% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 70%.

(Sumber: <http://www.harianpilar.com/2015/06/22/program-bina-lingkungan-bina-lingkungan-langgar-perda/>, diakses pada 3 September pukul 11.25).

Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan juga menimbulkan masalah lain, yaitu belum mengakomodir kebutuhan siswa miskin. Hal tersebut terjadi karena banyak siswa yang berasal dari keluarga mampu namun ikut serta mendaftar melalui jalur bina lingkungan dengan memalsukan status ekonomi, sehingga realisasi Program Bina Lingkungan tidak mengakomodir kebutuhan siswa miskin. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Hambali Sanusi dalam *Harianpilar.com* menegaskan jika jumlah masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung semenjak ada Program Bina Lingkungan mengalami peningkatan setiap tahun. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya kesempatan bagi siswa yang benar-benar berasal dari keluarga miskin untuk dapat diterima melalui jalur bina lingkungan.

(Sumber: <http://www.harianpilar.com/2015/06/23/program-bina-lingkungan-picu-meningkatnya-angka-kemiskinan/> , diakses pada 4 September 2016 pukul 17.00)

Aksi pemalsuan data yang dilakukan oleh calon peserta didik juga terjadi di SMPN 22 Bandar Lampung, berdasarkan hasil verifikasi data terdapat 27 calon siswa yang melakukan manipulasi data agar dapat diterima melalui jalur bina lingkungan di SMPN 22 Bandar Lampung. Kepala sekolah SMPN 22 Bandar Lampung telah mengkonfirmasi berita tersebut bahwa 27 calon siswa tersebut memang terbukti melakukan pemalsuan data menjadi tidak mampu.

(Sumber: <http://lampung.tribunnews.com/2015/06/13/waduh-27-siswa-berduit-daftar-jalur-bina-lingkungan>, diakses pada 13 Desember 2016 pukul 15.20).

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan juga menyebabkan terjadinya ketimpangan antara kuota bina lingkungan tenaga pendidik/guru dan kuota bina lingkungan murni. Di sekolah favorit pengguna kuota bina lingkungan guru terlihat lebih banyak dibandingkan dengan kuota bina lingkungan murni, hal tersebut terjadi karena guru berlomba-lomba ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit. Namun keadaan sebaliknya terjadi di sekolah yang dianggap kurang favorit. Contohnya di SMPN 2 Bandar Lampung pada seleksi penerimaan peserta didik tahun ajaran 2015/2016 menerima 77 siswa baru melalui jalur bina lingkungan dengan rincian 54 siswa melalui jalur bina lingkungan guru dan 23 siswa melalui jalur bina lingkungan murni.

(Sumber: <http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=kawasan&i=10648>, diakses pada 3 September 2016 pukul 13.48).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Alfi Wira Pratama dalam Jurnal yang berjudul Efektivitas Program Bina Lingkungan pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Kota Karang Raya Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan memiliki anak yang bersekolah dengan memanfaatkan Program Bina Lingkungan, dengan sampel sebesar 67 responden. Analisis efektivitas Program Bina Lingkungan pada masyarakat nelayan diukur menurut persepsi responden meliputi enam aspek yang dikaji

dalam penelitian ini, yakni pengetahuan, sosialisasi, tujuan, pemanfaatan, ketepatan sasaran, dan pemantauan program.

Kesimpulan penelitian tersebut adalah pelaksanaan Program Bina Lingkungan pada masyarakat nelayan Kelurahan Kota Karang Raya dinilai cukup efektif dengan hasil perhitungan sebesar 77,31%. Saran yang diberikan peneliti adalah diperlukan sosialisasi lebih merata dan sesering mungkin karena dengan sosialisasi yang intensif dan jangkauan luas masyarakat akan mengetahui informasi Program Bina Lingkungan secara detil dan valid. Selain itu, perlu pemantauan secara langsung oleh pihak penyelenggara program agar menghindari kecurangan dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan Program Bina Lingkungan dilakukan oleh Dian Risnawati pada tahun 2016 dalam Skripsi yang berjudul Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Kebijakan Jalur Bina Lingkungan (Studi Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2015 di SMAN 2 dan SMAN 9 Kota Bandar Lampung). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Peneliti menggunakan teori implementasi milik Richard Matland dalam Nugroho (2012) yakni dengan memilih 3 kriteria ketepatan yang dinilai cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. Ketiga kriteria tersebut adalah: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan dan ketepatan target.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 86 responden yang terdiri dari 20 responden guru, 33

responden wali murid dan 33 responden wali murid yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel secara random sampling dan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil yang dominan positif dimana para responden menyatakan bahwa kebijakan bina lingkungan sudah tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur yang ada, selain itu kebijakan bina lingkungan juga telah mengurangi angka putus sekolah di Kota Bandar Lampung.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Bunga Janati pada tahun 2014 dalam Skripsi yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, SMAN 12 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini berfokus pada model pendekatan evaluasi implementasi menurut Matland dalam Nugroho (2012: 743) yang melakukan evaluasi dengan melihat bagaimana kinerja implementasi kebijakan serta bagaimana strategi dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan.

Guna memberikan penilaian terhadap kebijakan tersebut, peneliti menggunakan kriteria evaluasi ketepatan menurut William N. Dunn sebagai alat ukur evaluasi pelaksanaan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung. Indikator ketepatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan hasil. Penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa, pelaksanaan kebijakan ini tidak tepat, sasaran melebihi aturan yang

telah ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 dan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan dinilai tidak tepat dikarenakan tujuan dari kebijakan ini tidak terpenuhi serta implementasi kebijakan program tersebut terlihat buruk.

Sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan evaluasi dengan merujuk pada model pendekatan evaluasi implementasi yang disampaikan oleh William N. Dunn dalam Suharno (2013: 115), yaitu evaluasi dilakukan secara menyeluruh baik dari *input*, proses maupun *output*. Guna memberikan penilaian dan mengukur berhasil atau tidaknya pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung, peneliti menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh Dunn dalam Mulyadi (2016:124), namun peneliti hanya akan menggunakan empat kriteria yang dianggap relevan dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan tersebut adalah: efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan Kota Bandar Lampung oleh Bunga Janati Tahun 2014 dengan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih jelasnya akan disajikan pada tabel 1:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan Kota Bandar Lampung oleh Bunga Janati Tahun 2014	Evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung
Tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Tipe deskriptif dengan pendekatan kuantitatif
Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, SMAN 14 Bandar Lampung, dan SMAN 12 Bandar Lampung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, SMPN 2 Bandar Lampung, dan SMPN 22 Bandar Lampung
Pendekatan evaluasi implementasi menurut Matland	Pendekatan evaluasi implementasi menurut William. N. Dunn
Fokus penelitian terhadap kriteria evaluasi ketepatan menurut William. N. Dunn yaitu ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan hasil.	Fokus penelitian terhadap kriteria evaluasi menurut William. N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.
Indikator: • Ketepatan pelaksanaan: SOP, aktor pelaksana, alur koordinasi dan pendanaan • Ketepatan target: target sasaran kebijakan dan intervensi target sasaran • Ketepatan hasil: tujuan kebijakan dan hasil pelaksanaan	Indikator: • Efektivitas: pencapaian tujuan kebijakan, peningkatan mutu pendidikan, pencapaian target kelompok sasaran sebesar 30% dan rayonisasi lokasi penerimaan peserta didik bina lingkungan • Efisiensi: sosialisasi dan <i>home visit</i>, dan biaya operasional pelaksanaan • Kecukupan: kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan kelompok sasaran • Kesamaan: distribusi penerimaan peserta didik jalur bina lingkungan murni dan bina lingkungan guru di sekolah favorit dan biasa

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2017

Maksud pembuatan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan pada dasarnya sangat baik, namun pada pelaksanaannya muncul berbagai macam permasalahan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait Evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung, karena evaluasi kebijakan bertujuan untuk melakukan penilaian secara keseluruhan

dan relevan atas suatu kebijakan dan kesesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian adalah “Bagaimana pencapaian Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pencapaian Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui faktor-faktor ketidakberhasilan pencapaian Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam Ilmu Pemerintahan serta menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai evaluasi kebijakan.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat serta gambaran nyata khususnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pandangan James Anderson dalam Wahab (2016: 8) mengenai kebijakan adalah suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu yang dihadapi. Kebijakan dalam hal ini memiliki makna sebagai sebuah respon atas permasalahan yang terjadi. Parsons dalam Hill, M. and P. Hupe (2002: 5) menyatakan jika pengetahuan masyarakat sangat penting dalam proses kebijakan publik. Kebijakan publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, karena pada dasarnya masyarakat paling mengerti permasalahan yang terjadi dalam ranah publik.

Thomas R. Dye (Syafiie, 2011: 115) mengatakan jika kebijakan negara yaitu apapun yang diambil Pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sama sekali. Maksud dari pernyataan tersebut adalah jika Pemerintah melakukan sesuatu menjadi keputusan maka tidak melakukan apapun sama sekali juga keputusan, karena Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan dapat melakukan hal yang sifatnya mencegah

dan apabila hanya diam maka dapat dikatakan sengaja melindungi untuk maksud materi.

Sedangkan pengertian kebijakan publik menurut Wilson dalam Wahab (2016: 13) adalah:

“Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan Pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah diambil atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)”.

Akan tetapi, definisi tersebut cakupannya terlalu luas sehingga akan sulit dipahami oleh orang yang baru mengenal dan mempelajari kebijakan publik.

David Easton dalam Ndraha (2003: 492) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pemegang otoritas. Senada dengan pendapat David Easton, Sugandi (2011: 79) berpendapat jika kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang mengikat banyak orang dan secara garis besar dibuat oleh pemegang otoritas publik. Keputusan yang bersifat mengikat publik harus dibuat oleh otoritas politik, selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh birokrasi Pemerintah.

Menurut Petter Bridgman dan Glyn Davis dalam Wicaksono (2006: 65) terdapat lima karakteristik untuk mempermudah memahami kebijakan publik, yaitu:

- a) Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami;
- b) Melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya;
- c) Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu;
- d) Pada hakikatnya adalah politis;
- e) Bersifat dinamis.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembuatan kebijakan publik selalu melibatkan hubungan antara Pemerintah dan masyarakat. Kebijakan publik mengandung makna bahwa terdapat suatu ruang dalam kehidupan yang bukan milik pribadi melainkan milik umum. Jadi kebijakan publik merupakan sebuah keputusan dari lembaga yang berwenang atau Pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

2. Proses Kebijakan Publik

Dunn (2003: 22) berpendapat jika proses pembuatan kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan melalui rangkaian tahapan yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

- a) Penyusunan agenda. Dalam penyusunan agenda, para pejabat yang terpilih meletakkan masalah atau isu sebagai agenda publik;
- b) Formulasi kebijakan. Pada tahap ini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan sebagai jawaban atas permasalahan;
- c) Adopsi kebijakan. Setelah membuat alternatif kebijakan kemudian kebijakan tersebut diadopsi berdasarkan dukungan mayoritas dari badan legislatif, konsesus diantara direktur kelembagaan atau putusan peradilan;
- d) Implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah di adopsi kemudian dilaksanakan oleh unit administrasi yang menggerakkan sumber daya finansial dan manusia;
- e) Evaluasi kebijakan. Badan pemeriksa dan akutansi Pemerintahan menentukan apakah lembaga eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan Undang-Undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Penjelasan mengenai tahap-tahap proses kebijakan publik di atas menjelaskan bahwa tahap-tahap dalam proses kebijakan publik saling

berkesinambungan dan mempengaruhi satu sama lain. Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada proses evaluasi kebijakan. Alasan peneliti memilih pada proses evaluasi kebijakan karena untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung dengan melihat sejauh mana pencapaian implementasi dari Program Bina Lingkungan itu sendiri.

B. Tinjauan tentang Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Badjuri dan Yuwono dalam Tangkilisan (2003: 25) menyatakan jika tahapan yang cukup penting dan sering terlupakan efektivitasnya dalam konteks kebijakan publik di Indonesia adalah evaluasi kebijakan. Istilah evaluasi memiliki arti yang sangat berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Howlett dan Ramesh dalam Mulyadi (2016: 121) menyatakan jika evaluasi merupakan pengkajian secara sistematis dan empiris terhadap akibat dari kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut.

Ketika hasil kebijakan memberikan sumbangan terhadap sasaran dan tujuan pembuatan kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program tersebut telah mencapai tingkat kinerja yang dapat mengatasi masalah publik. Nekola dalam Peters, B. G. and J. Pierre (2006, 338)

menyatakan bahwa evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan dan memainkan peran yang sangat fundamental. Setiap kebijakan publik harus dimonitor dan dievaluasi dalam perjalanan implementasinya sehingga keputusan yang diambil dapat dijadikan pertimbangan untuk melanjutkan, menyesuaikan atau menghentikan kebijakan.

Winarno (2012: 23) menyatakan jika evaluasi kebijakan dipandang sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi sebenarnya dari kebijakan pada kondisi kehidupan nyata. Fischer, F., G. J. Miller, M. S. Sidney (2007: 608) berpendapat jika studi evaluasi lebih difokuskan pada efisiensi, dan efektivitas dimensi struktur birokrasi maupun proses untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan atau program tersebut telah mencapai tujuan dari pembuatan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, peneliti berpendapat bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian atas pencapaian implementasi kebijakan dan menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil penilaian tersebut berguna untuk bahan pembelajaran bagi para aktor kebijakan agar kelemahan atau kekurangan tidak terulang diwaktu yang akan datang.

2. Dimensi Dimensi Evaluasi Kebijakan

Dunn dalam Suharno (2013: 115) memiliki pendapat bahwa evaluasi kebijakan publik mempunyai empat lingkup makna yaitu evaluasi

perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Keempat dimensi tersebut sebagai fokus evaluasi kebijakan.

a. Evaluasi formulasi kebijakan publik

Secara umum evaluasi formulasi berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik dilaksanakan, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, mengarah pada permasalahan inti, mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, mendayagunakan sumberdaya yang ada secara optimal baik berupa waktu, dana, manusia maupun kondisi lingkungan.

b. Evaluasi implementasi kebijakan publik

Evaluasi implementasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga timing evaluasi yaitu sebelum dilaksanakan (*input*), pada waktu dilaksanakan (*proses*) dan setelah dilaksanakan (*output*).

c. Evaluasi kinerja kebijakan publik

Dimensi penilaian kinerja kebijakan yang berkenaan dengan: dimensi hasil, dimensi proses pencapaian hasil dan pembelajaran, dimensi sumber daya yang digunakan, dimensi keberadaan dan perkembangan organisasi, dimensi keberadaan dan perkembangan organisasi, dan dimensi kepemimpinan dan pembelajarannya.

d. Evaluasi lingkungan kebijakan publik

Evaluasi lingkungan yaitu konteks lingkungan dikedepan karena perubahan lingkungan terjadi hari ini dan dimasa depan adalah

perubahan dalam volume yang besar dan cepat. Evaluasi lingkungan kebijakan publik memberikan sebuah deskripsi yang lebih jelas bagaimana konteks kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan. Untuk penelitian ini peneliti memilih salah satu dimensi evaluasi kebijakan yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian yaitu mengenai evaluasi implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada penelitian ini peneliti akan melakukan evaluasi dengan menggunakan pendekatan evaluasi implementasi yaitu melakukan evaluasi dari segi *input*, proses maupun *output* serta menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang sesuai guna mempermudah peneliti untuk melakukan evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan baik dari tahap *input*, proses maupun *output*.

3. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Mulyadi (2016: 124) terdapat enam kriteria yang digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu:

- a. Efektivitas, fokus dari kriteria ini terletak pada pencapaian hasil. Efektivitas berkaitan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan maupun nilai moneterinya.
- b. Efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

- c. Kecukupan, berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- d. Kesamaan, berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk kepada distribusi akibat dan usaha secara merata antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Menurut Dunn (2003: 434) kebijakan yang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan adalah berkaitan dengan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan. Suatu kebijakan dapat dikatakan tidak efektif, efisien dan mencukupi apabila kelompok sasaran tidak menerima pelayanan seperti yang diharapkan.
- e. Responsivitas, berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai masyarakat.
- f. Ketepatan, berkaitan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Kriteria ketepatan cenderung menganalisis mengenai manfaat dari suatu kebijakan terhadap kelompok sasaran.

Berdasarkan kriteria-kriteria evaluasi tersebut, peneliti akan menggunakan beberapa kriteria diantaranya adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan. Alasan peneliti mengapa hanya menggunakan empat kriteria dalam mengevaluasi kebijakan karena kriteria-kriteria tersebut relevan dan dapat menjawab masalah yang akan diteliti, selain

itu juga dapat membatasi ruang lingkup penelitian agar fokus terhadap masalah yang akan diteliti.

4. Lingkungan Evaluasi Kebijakan

Seorang evaluator harus mempertimbangkan keterkaitan orang yang bersangkutan dengan program yang akan dievaluasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Wahab (2016: 45) lingkungan evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal.

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan individu yang menjadi bagian dari struktur formal yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Maksud struktur formal adalah *stakeholders* atau aktor pelaksana kebijakan dan implementasi program yang akan dievaluasi. Kelebihan melakukan evaluasi dalam lingkungan internal adalah responden/ informan lebih memahami program yang akan dievaluasi, namun kekurangannya adalah responden/informan dikhawatirkan akan bertindak subyektif.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan individu yang tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, namun terkena *impact* serta dampak pelaksanaan kebijakan. Mereka diminta untuk mengevaluasi keberhasilan program atau

keterlaksanaan kebijakan yang sudah diputuskan. Kelebihan melakukan evaluasi dalam lingkungan eksternal adalah responden/informan akan bertindak objektif selama melakukan evaluasi sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan keadaan dan kenyataan, namun kekurangannya responden/informan tersebut kurang memahami kebijakan atau program yang akan dievaluasi.

Lingkungan internal dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dan Guru di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung. Sedangkan lingkungan eksternal dalam penelitian ini adalah kelompok sasaran yang terkena *impact* serta dampak pelaksanaan kebijakan yaitu wali murid di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung.

C. Konsep Kebijakan Pendidikan

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk merangsang peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi yang dimiliki. John Dewey (1958) dalam Petters dan Pierre (2006: 232) menyatakan bahwa pendidikan pada dasarnya pendidikan berkaitan dengan perkembangan masyarakat demokratis di mana setiap orang memiliki kebebasan dan berpartisipasi.

Kebijakan pendidikan pada dasarnya tidak terlepas dari realitas pendidikan itu sendiri. Pandangan tersebut senada dengan pendapat Tilaar dan Nugroho (2008) seperti yang dikutip dalam Jurnal Aminuddin Bakry (2010) pada hari Senin, 5 September 2016 pukul 14.45 mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan pada dasarnya sangat berkaitan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia yang merdeka. Aminuddin Bakry (2010) menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik. Kebijakan pendidikan memberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya kepada warga masyarakat melalui pendidikan gratis menunjukkan indikasi bahwa pendidikan merupakan barang publik yang harus ditanggung pemerintah.

Sedangkan menurut H.A.R Tilaar (2009: 7) sebagaimana dikutip dalam Jurnal Mujiyanto Solichin (2015) pada hari Senin, 5 September 2016 pukul 15.25 kebijakan pendidikan adalah rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan melalui lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dalam Irianto (2011: 49) kebijakan pendidikan berfungsi sebagai alat dalam mencapai tujuan-tujuan pelaksanaan pendidikan.

Pandangan mengenai nilai pendidikan tidak terbatas pada etika baik atau tidak baik, namun lebih menekankan pada tujuan pembentukan kebijakan dalam pendidikan. Nilai dan tujuan tersebut dapat dilihat apabila kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Menurut Irianto (2011: 49) karakteristik etika kebijakan dalam konteks manajemen pendidikan adalah:

- a. Kebijakan pendidikan diperoleh melalui penemuan empiris dengan menggunakan prosedur dan teknik ilmiah;
- b. Kriteria, alat dan prosedur yang dipergunakan dalam menganalisis kebijakan pendidikan bersifat relatif untuk setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- c. Masing-masing implementasi kebijakan pendidikan harus menghasilkan produk dan dampak yang bernilai , baik yang bersifat intristik maupun ekstrinsik;
- d. Nilai baik pada setiap situasi implementasi kebijakan pendidikan terletak pada proses aktif;
- e. Sikap yang baik adalah yakin bahwa kondisi implementasi kebijakan pendidikan pada suatu saat akan bernilai baik dan buruk, tergantung apa yang telah, sedang dan akan diusahakan.

D. Tinjauan tentang Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu dan berasal dari anak guru untuk memperoleh layanan pendidikan pada satuan pendidikan di Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menetapkan asas-asas dalam menyeleksi calon peserta didik jalur bina lingkungan, yakni berpedoman secara obyektif, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif.

Landasan penyelenggaraan pendidikan dan Program Bina Lingkungan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang SD, SMP dan sederajat di Kota Bandar Lampung. Program Bina Lingkungan yang dibentuk oleh Walikota Bandar Lampung ditujukan untuk calon peserta didik yang berasal dari anak guru dan keluarga kurang mampu di Kota Bandar Lampung. Peserta didik bina lingkungan yang

akan melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya diharapkan mendaftar pada sekolah yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal.

Berdasarkan website resmi *bandarlampung.siap-ppdb.com* yang diakses pada 1 September 2016 pukul 18.45 , peserta didik yang berhak mengikuti seleksi jalur bina lingkungan adalah:

1. Calon siswa baru dari keluarga belum mampu secara ekonomi yang berdomisili dekat dengan sekolah pilihan, dan resmi sebagai warga Kota Bandar Lampung dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus PPDB yang telah ditetapkan;
 - b. Memiliki surat keterangan tidak mampu dari Lurah yang ditandatangani oleh Lurah (tidak boleh atas nama) dan dari sekolah asal serta melampirkan surat keterangan dari RT;
 - c. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga dan KTP orang tuanya;
 - d. Menyerahkan kartu keluarga yang asli, dan akan dikembalikan pada saat pengumuman;
 - e. Hanya diperkenankan memilih satu sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
2. Anak kandung pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Menyerahkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga atau KP4;
 - b. Menyerahkan fotocopy surat tugas dari satuan pendidikan tempat bertugas;
 - c. Memenuhi persyaratan umum/khusus PPDB tahun yang telah ditetapkan;
 - d. Dapat memilih sekolah tempat orang tuanya bertugas, atau sekolah lain yang terdekat dengan tempat tinggal orang tuanya.
3. Jika persyaratan yang dimaksud pada angka satu dan dua di atas terpenuhi maka dapat diterima di SMP Negeri tanpa mengikuti proses seleksi
4. Apabila pendaftar melampaui kuota yang telah ditetapkan akan diadakan seleksi berdasarkan kemampuan akademik atau hasil verifikasi biodata melalui *home visit* yang dilakukan oleh panitia. (Sumber: <https://bandarlampung.siap-ppdb.com/>, diakses tanggal 1 september 2016)

Daya tampung sekolah dalam jalur bina lingkungan baik jenjang SD, SMP dan yang sederajat adalah sebesar 70% peserta didik masuk melalui jalur reguler dan 30% peserta didik masuk melalui jalur bina lingkungan.

E. Kerangka Pikir

Widayat dan Amirullah (2002) dalam Masyhuri dan Zainuddin (2011: 119) memberikan pengertian kerangka berfikir sebagai sebuah konsep tentang bagaimana hubungan teori terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Pemerintah telah menghapus sistem sentralisasi dalam dunia pendidikan menjadi sistem desentralisasi dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan merupakan wujud dari otonomi daerah, yang berarti daerah memiliki kewenangan dalam bidang pengelolaan pendidikan.

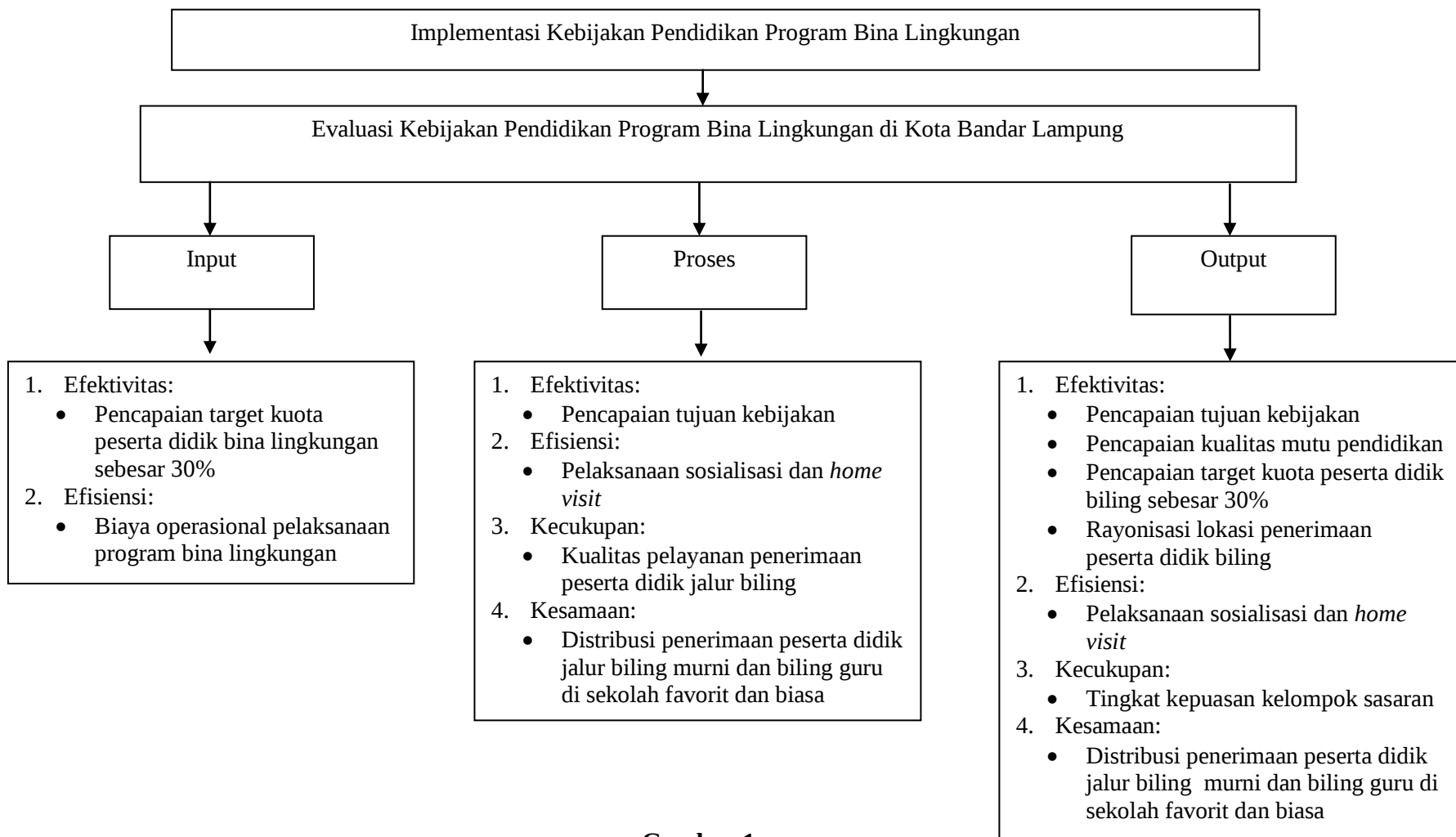
Sebagai wujud konsistensi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan di daerah, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung membuat sebuah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Fokus pembangunan dalam bidang pendidikan di Bandar Lampung diarahkan untuk peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan manajemen pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Walikota Bandar Lampung membuat sebuah kebijakan berupa Program Bina Lingkungan.

Bina lingkungan merupakan sebuah program yang memberikan perluasan akses pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu di Kota Bandar Lampung. Sasaran Program Bina Lingkungan adalah peserta didik SD, SMP, dan SMA sederajat. Program Bina Lingkungan bertujuan memberi kesempatan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu

dan berasal dari anak guru untuk memperoleh layanan pendidikan pada satuan pendidikan di Kota Bandar Lampung. Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan telah berjalan selama empat tahun, namun dalam pengimplementasiannya Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan mengalami banyak sekali permasalahan.

Banyak permasalahan yang timbul pada Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan, diantaranya yaitu penetapan jumlah kuota penerimaan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012, belum mengakomodir kebutuhan siswa miskin dan masih banyak lagi permasalahan lainnya di lapangan. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung.

Evaluasi tersebut dilakukan dengan merujuk pada pendekatan evaluasi implementasi yang disampaikan oleh William N. Dunn yaitu evaluasi dilakukan secara menyeluruh baik dari tahap *input*, proses maupun *output*. Selain itu agar mempermudah peneliti dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan kriteria-kriteria evaluasi yang disampaikan oleh Dunn dalam Mulyadi (2016:124), beberapa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan. Namun, dari segi *input* hanya menggunakan kategori efektivitas dan efisiensi saja, karena untuk membatasi ruang lingkup bahasan agar tidak terlalu luas dan sesuai dengan sub indikator yang telah dibuat. Penjelasan alur kerangka pikir lebih lanjut dan ringkas akan peneliti gambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode ini bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Selain itu harus searah dengan rumusan masalah karena tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah.

Siregar (2013:86) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Penggunaan angka dalam penelitian kuantitatif dapat digunakan pula data-data kualitatif yang dikonversi ke dalam bentuk angka. Seperti data-data jenis kelamin, tingkat pendidikan, persepsi, motivasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melakukan “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung” dengan menggunakan perhitungan atas kriteria evaluasi dan indikator yang akan menghasilkan penilaian terhadap implementasi kebijakan Program Bina Lingkungan. Tujuan akhir penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendeskripsikan secara statistik dan menafsir atau meramalkan hasil penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang teliti untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Tindakan yang harus dilakukan untuk menentukan lokasi penelitian adalah dengan cara mempertimbangkan teori dan mempelajari lebih dalam mengenai indikator serta rumusan masalah penelitian, serta mempertimbangkan dari sisi geografis dan praktis baik dari segi pertimbangan waktu, biaya dan tenaga. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, SMPN 22 Bandar Lampung dan SMPN 2 Bandar Lampung.

Peneliti memilih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung merupakan institusi atau lembaga yang mengerti dan berperan penting dalam pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan, baik dari tahap sosialisasi, verifikasi data, pengumuman, bahkan

hingga menerima pengaduan yang diajukan oleh wali murid di posko pengaduan Program Bina Lingkungan. Selanjutnya, agar memperoleh informasi yang lebih valid maka peneliti memilih dua sekolah yaitu SMPN 22 Bandar Lampung dan SMPN 2 Bandar Lampung karena sekolah tersebut merupakan tempat pengimplementasian Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan, serta di sekolah tersebut juga terdapat masalah dalam pengimplementasian Program Bina Lingkungan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Sarwono (2006: 16) mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh langsung dengan cara menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informan-informan pada penelitian ini dipilih dengan berdasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data serta bersedia memberikan informasi data. Data primer diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik kuesioner dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Sumber Data Primer Penelitian

No	Teknik Pengambilan Data Primer	Responden dan Informan	Waktu Pelaksanaan
1	Kuesioner	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	11-16 April 2017

(1)	(2)	(3)	(4)
		Guru dan Wali murid SMPN 2 Bandar Lampung	17-26 April 2017
		Guru dan Wali murid SMPN 22 Bandar Lampung	17-26 April 2017
2	Wawancara	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	13 Juni 2017
		Guru dan Wali murid SMPN 22 Bandar Lampung	14 - 15 Juni 2017
		Guru dan Wali murid SMPN 2 Bandar Lampung	14 - 15 Juni 2017

Sumber: data diolah peneliti tahun 2017

2. Data Sekunder

Sarwono (2006: 17) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang telah dilakukan maupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Sumber Data Sekunder Penelitian

No	Keterangan Data Sekunder	Waktu Pengambilan
1	Peraturan Daerah No 01 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	15 April 2017
2	Peraturan Walikota No 49 tahun 2013 tentang Pedoman PPDB	13 April 2017
3	Daftar Guru SMPN 22 Bandar Lampung	17 April 2017
4	Daftar Guru SMPN 2 Bandar Lampung	25 April 2017
5	Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	15 April 2017
6	Daftar Siswa Bina Lingkungan Kelas VII di SMPN 22 Bandar Lampung	17 April 2017
7	Daftar Siswa Bina Lingkungan Kelas VII di SMPN 2 Bandar Lampung	25 April 2017
8	Data Calon Peserta Didik Baru Jalur Bina Lingkungan Murni SMPN 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017	25 April 2017

Sumber: data diolah peneliti tahun 2017

D. Definisi Konseptual

Evaluasi merupakan pengkajian secara sistematis dan empiris terhadap akibat dari kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut. Ketika hasil kebijakan memberikan sumbangan terhadap sasaran dan tujuan pembuatan kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program tersebut telah mencapai tingkat kinerja untuk mengatasi masalah publik.

Studi evaluasi lebih difokuskan pada efisiensi dan efektivitas dimensi struktur birokrasi maupun proses untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan atau program tersebut telah mencapai tujuan dari pembuatan kebijakan itu sendiri. Intinya, evaluasi kebijakan dilakukan untuk melakukan penilaian atas pencapaian implementasi kebijakan dan menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil dari penilaian evaluasi tersebut berguna untuk bahan pembelajaran bagi para aktor kebijakan agar kelemahan atau kekurangan tidak terulang di waktu yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Menurut Siregar (2013:111) definisi operasional dalam penelitian merupakan bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi definisi konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan dan penilaian alat ukur. Judul penelitian ini terlihat variabel, yaitu evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan. Untuk mengetahui

indikator-indikator yang mengidentifikasi evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan, maka peneliti memilih efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan sebagai alat ukur evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung. Definisi operasional dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Konsep	Indikator	Sub Indikator
1	Evaluasi	Evaluasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk melakukan penilaian atas pencapaian implementasi kebijakan dan menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.	a. Efektivitas	1. Pencapaian tujuan dalam memberikan kesempatan kepada calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh pendidikan di Kota Bandar Lampung 2. Pencapaian kualitas mutu pendidikan 3. Pencapaian target kuota peserta didik bina lingkungan sebesar 30% 4. Rayonisasi lokasi penerimaan peserta didik bina lingkungan
			b. Efisiensi	1. Sosialisasi dan <i>Home visit</i> 2. Biaya operasional pelaksanaan Program Bina Lingkungan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			c. Kecukupan	1. Kualitas pelayanan penerimaan peserta didik jalur bina lingkungan 2. Tingkat kepuasan kelompok sasaran
			d. Kesamaan	1. Distribusi penerimaan peserta didik jalur bina lingkungan murni dan bina lingkungan guru di sekolah favorit dan biasa

Sumber: data diolah peneliti tahun 2017

F. Dimensi Dimensi Evaluasi Kebijakan

Dunn dalam Suharno (2013: 115) memiliki pendapat bahwa evaluasi kebijakan publik mempunyai empat lingkup makna yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Keempat dimensi tersebut merupakan fokus evaluasi kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan evaluasi dengan menggunakan dimensi evaluasi implementasi. Dimensi evaluasi implementasi dilakukan dengan mengevaluasi dari tahap *input*, proses maupun *output* serta menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang sesuai sebagai indikator guna mempermudah peneliti untuk melakukan evaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan. Lebih jelasnya akan peneliti sajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Evaluasi berdasarkan Dimensi Evaluasi Implementasi

No	Dimensi Evaluasi Implementasi	Indikator Kriteria Evaluasi	Sub Indikator
1	Input	1. Efektivitas	Pencapaian target kuota peserta didik bina lingkungan sebesar 30%
		2. Efisiensi	Biaya operasional pelaksanaan Program Bina Lingkungan
2	Proses	1. Efektivitas	Pencapaian tujuan kebijakan
		2. Efisiensi	Pelaksanaan sosialisasi dan <i>home visit</i>
		3. Kecukupan	Kualitas pelayanan penerimaan peserta didik jalur bina lingkungan
		4. Kesamaan	Distribusi penerimaan peserta didik jalur bina lingkungan murni dan bina lingkungan guru di sekolah favorit dan biasa
3	Output	1. Efektivitas	- Pencapaian tujuan kebijakan - Pencapaian kualitas mutu pendidikan - Pencapaian target kuota peserta didik bina lingkungan sebesar 30% - Rayonisasi lokasi penerimaan peserta didik bina lingkungan
		2. Efisiensi	Pelaksanaan sosialisasi dan <i>home visit</i>
		3. Kecukupan	Tingkat kepuasan kelompok sasaran
		4. Kesamaan	Distribusi penerimaan peserta didik jalur bina lingkungan murni dan bina lingkungan guru di sekolah favorit dan biasa

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2017

G. Populasi, Teknik Sampling dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sumaatmadja dalam Siregar (2013:30) populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti atas semua kasus dan gejala yang ada di daerah penelitian. Sesuatu dapat dikatakan sebagai populasi minimal memiliki satu karakteristik umum

yang sama. Kata populasi amat populer dipakai untuk menyebutkan serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung. Mulyadi (2016: 138) menyatakan jika kegiatan evaluasi kebijakan publik dilakukan pada pemerintah dan kelompok sasaran kebijakan karena merupakan *entry point* dalam menentukan suatu kebijakan publik dinilai berhasil atau tidak dalam mencapai sasaran, tujuan dan dampak yang menjadi *content* dari kebijakan tersebut. Maka dari itu sesuai dengan masalah yang diteliti, populasi pada penelitian ini tidak hanya berasal dari kalangan pemerintah, namun juga berasal dari kelompok sasaran kebijakan. Sehingga populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan institusi atau lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan, baik dari tahap sosialisasi, *home visit*, pengumuman, bahkan hingga menerima pengaduan yang diajukan oleh Wali Murid di posko pengaduan Program Bina Lingkungan.

Tabel 6. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

NO	Instansi	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	169 orang
Jumlah		169 orang

Sumber: Daftar Absen Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2017

Dari jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebanyak 169 orang, jumlah pegawai yang mengerti dan membidangi program bina lingkungan adalah sebanyak 28 orang. Sehingga populasi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung adalah sebanyak 28 orang, yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
3. Pegawai pada Sub Bagian Program dan Informasi
4. Pegawai pada Bidang Pendidikan Dasar yang terdiri dari Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar, Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar, serta Seksi PTK Pendidikan Dasar.

b. Guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung

Guru merupakan tenaga pengajar yang mengetahui Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dan berhubungan langsung dengan peserta didik jalur bina lingkungan. Maka peneliti menganggap guru mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan.

Tabel 7. Jumlah Guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017

NO	Nama Sekolah	Jumlah
1	SMPN 2 Bandar Lampung	76 orang
2	SMPN 22 Bandar Lampung	54 orang
Jumlah		130 orang

Sumber: Data Rekapitulasi Guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017

Dari jumlah guru di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung sebanyak 130 orang, jumlah guru yang mengerti dan berhubungan langsung dengan peserta didik bina lingkungan adalah sebanyak 22 orang. Sehingga populasi guru di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung adalah sebanyak 22 orang

c. Wali Murid Bina Lingkungan Kelas VII SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung

Wali Murid Bina Lingkungan merupakan kelompok sasaran utama yang mengetahui dan menerima Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan. Peneliti beranggapan jika Wali Murid mengerti tentang pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan.

Tabel 8. Jumlah Wali Murid Bina Lingkungan kelas VII SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017

NO	Nama Sekolah	Jumlah
1	SMPN 2 Bandar Lampung	18 orang
2	SMPN 22 Bandar Lampung	182 orang
Jumlah		200 orang

Sumber: Data Rekapitulasi Wali Murid Kelas VII SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017

Dari jumlah wali murid bina lingkungan kelas VII di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung sebanyak 200 orang, jumlah wali murid yang mengerti dan memahami pelaksanaan program bina lingkungan adalah sebanyak 33 orang. Sehingga populasi wali murid di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung adalah sebanyak 28 orang

Tabel 9. Jumlah Populasi

No	Keterangan	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Populasi
1	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	169 orang	28 orang
2	Guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung	130 orang	22 orang
3	Wali murid bina lingkungan kelas VII SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung	200 orang	33 orang
Jumlah		499 orang	83 orang

Sumber: data diolah peneliti tahun 2017

2. Teknik *Sampling*

Teknik *sampling* dalam penelitian ini adalah *sampling* jenuh atau sensus. *Sampling* jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. *sampling* jenuh digunakan apabila jumlah populasi relatif kecil dan kurang dari 100 orang. Populasi pada penelitian ini terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, guru di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung serta wali murid di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung dengan total keseluruhan adalah sebanyak 83 orang.

3. Sampel

Menurut Neuman dalam Herdiansyah (2010:104), sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dilibatkan dalam penelitian serta merupakan bagian representatif dan mempresentasikan karakter atau ciri-ciri dari populasi. Populasi dalam penelitian ini relatif kecil hanya

berjumlah 83 orang, sehingga keseluruhan dari populasi penelitian dijadikan sebagai sampel.

Tabel 10. Jumlah Sampel

NO	Kriteria Populasi	Jumlah Sampel
1	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	28 orang
2	Guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung	22 orang
3	Wali Murid Bina Lingkungan Kelas VII SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung	33 orang
Jumlah		83 orang

Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2017

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data, karena jika seorang peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Kuesioner

Siregar (2013: 60) menyatakan jika penggunaan daftar pertanyaan dapat digunakan untuk jenis penelitian eksperimen, penelitian lapangan, dan berbagai aktifitas pengumpulan data lainnya. Pengembangan model pertanyaan termasuk bagian dari perancangan alat ukur. Menurut Arikunto (2000:194) kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang

pribadinya, atau hal-hal yang diketahui oleh responden. Waktu pelaksanaan penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Pelaksanaan Penelitian melalui Kuesioner

No	Teknik Pengumpulan Data	Responden	Waktu Pelaksanaan
1	Kuesioner	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	11-16 April 2017
2	Kuesioner	Guru dan Wali Murid SMPN 2 Bandar Lampung	17-26 April 2017
3	Kuesioner	Guru dan Wali Murid SMPN 22 Bandar Lampung	17-26 April 2017

Sumber: data diolah peneliti tahun 2017

2. Wawancara

Menurut Mack,dkk (2005: 29) wawancara bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perspektif peserta pada topik penelitian. Selama wawancara posisi informan yang diwawancarai adalah sebagai guru dan peneliti selaku pewawancara dianggap sebagai murid. Kerlinger (1973: 480) menyatakan bahwa wawancara digunakan untuk tiga tujuan utama. Tujuan yang pertama yaitu menjadikan wawancara sebagai perangkat eksplorasi untuk membantu mengidentifikasi variabel dan hubungan, membuat sebuah hipotesis, dan membantu menuju fase lain dari penelitian ini.

Kedua, wawancara menjadi instrumen utama penelitian karena pertanyaan yang dirancang untuk mengukur variabel penelitian akan disampaikan pada saat proses wawancara. Ketiga, dengan wawancara peneliti dapat menindak lanjuti hasil , memvalidasi, dan lebih mengerti alasan atas

jawaban dari narasumber. Waktu pelaksanaan wawancara dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Pelaksanaan Penelitian melalui Wawancara

Nama Informan	Jabatan	Waktu Wawancara
Suharsono. S.Sos.	Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar	13 Juni 2017
Yasmin. SE	Staf Kelembagaan Pendidikan Dasar	13 Juni 2017
Malwani. S.Pd	Wakil Kepala Sekolah bagian Humas SMPN 22 Bandar Lampung	14 Juni 2017
Yanuar Ahmadi. S.Pd. MM	Wakil Kepala Sekolah bagian Humas SMPN 2 Bandar Lampung	14 Juni 2017
Suroso	Wali murid bina lingkungan kelas VII SMPN 22 Bandar Lampung	15 Juni 2017
Adiansyah	Wali murid bina lingkungan kelas VII SMPN 2 Bandar Lampung	15 Juni 2017

Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2017

3. Dokumentasi

Suwandi dan Basrowi (2008: 158) menyatakan jika dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sehingga akan memperoleh data yang benar-benar valid. Dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

Dokumen yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perda No 01 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perwali No 49 tahun

2013 tentang Pedoman PPDB, data Guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung, data pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, data Wali murid bina lingkungan kelas VII SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung serta dokumen lain yang relevan.

I. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah mengadakan pengolahan data. Menurut Siregar (2013: 86) pengolahan data dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Editing adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan.
- b. Coding adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data yang akan dianalisis. Pemberian kode melalui program Microsoft exel dalam menghitung data.
- c. Tabulasi adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data.

- d. Penyajian Data adalah suatu bentuk penyajian data ke dalam bentuk tabel, baik itu dalam tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang yang nantinya dapat digunakan untuk penyajian data di dalam isi penelitian.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert. Menurut Firdaus dalam Herdiansyah (2012: 44) skala likert umumnya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu. Skala likert memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu: pernyataan positif dan negatif. Bentuk jawaban skala likert memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Contoh pengukuran skala likert berupa bentuk pernyataan dengan pilihan jawaban *multiple choice*, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung berhasil mencapai tujuan dengan baik
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu ragu
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju

Sarwono (2006: 96) menyebutkan untuk melakukan kuantitatifikasi maka skala tersebut kemudian diberi angka-angka sebagai simbol agar dapat

dilakukan analisis. Umumnya dengan memberikan kode-kode angka yang relatif karena angka-angka tersebut hanya merupakan simbol dan bukan angka sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, kode-kode angka dalam skala likert adalah sebagai berikut:

1. Sangat setuju diberi skor 5.
2. Setuju diberi skor 4.
3. Ragu-ragu baik diberi skor 3.
4. Tidak setuju diberi skor 2.
5. Sangat tidak setuju diberi skor 1.

Sedangkan, untuk mengetahui persentase dari jawaban responden adalah menggunakan rumus persentase berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi suatu kasus

N = Jumlah populasi

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dari masing-masing segi evaluasi dengan menggunakan rumus perhitungan interval untuk mengetahui kategori pendapat responden sebagai hasil evaluasi. Kategori jawaban yang digunakan dalam analisis data evaluasi adalah sebanyak 2 kategori yaitu positif dan negatif karena untuk mengetahui seberapa tinggi respon dari responden untuk menentukan bagaimana pencapaian implementasi kebijakan.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Somantri (2000: 40) dalam Arikunto yaitu skala likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur tanggapan positif maupun negatif terhadap suatu pernyataan sehingga hasil evaluasi adalah dalam bentuk kategori positif dan negatif. Kemudian setelah mengetahui intervalnya, tahap berikutnya adalah menentukan batasan skor. Arikunto (2000:126) mengatakan bahwa kategori hasil evaluasi dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus interval sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval nilai skor
NT = Nilai Tertinggi
NR = Nilai Terendah
K = Kategori

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil SMPN 22 Bandar Lampung

1. Sejarah SMPN 22 Bandar Lampung

SMPN 22 Bandar Lampung berdiri pada tahun 1992 dan mulai melaksanakan aktifitas belajar mengajar sejak tanggal 15 Mei 1992, sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud RI, nomor 193/c/kep/1/1992. SMPN 22 Bandar Lampung terletak di lingkungan yang strategis, mudah dijangkau, dan berada di lingkungan beberapa lembaga pendidikan tinggi dan terminal Rajabasa. *Input* siswa berasal dari taraf ekonomi dan sosial budaya yang beragam. Taraf ekonomi orang tua siswa mayoritas pada tingkat menengah ke bawah serta latar belakang pendidikan mayoritas di bawah SMA. Meskipun demikian, tingkat kepedulian masyarakat atau Wali Murid cukup mendukung. Siswa di SMPN 22 Bandar Lampung mayoritas berasal dari luar kota Bandar Lampung.

Jumlah rombongan belajar ada 30 dengan tenaga pendidik sebanyak 57 guru yang berlatar belakang pendidikan S1 = 95 %, tetapi dari kualifikasi pendidikan tidak berimbang. Jumlah tenaga kependidikan sebanyak 5 orang PNS dan 6 orang honorer. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan

mengacu kepada inovasi pembelajaran. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk pendidikan keterampilan cukup memadai, namun perlu adanya perbaikan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Dari sisi lain dalam memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana kurang ditunjang dengan jumlah guru keterampilan yang ada. Jumlah guru keterampilan sebanyak 3 orang yang seharusnya minimal 6 orang.

SMPN 22 Bandar Lampung merupakan sekolah plus yang mengembangkan keterampilan pengerjaan logam, bangunan, dan kerumahtanggaan. Sekolah tersebut sebelumnya menerapkan dua kurikulum yaitu mengikuti kurikulum sekolah reguler dan kurikulum keterampilan. Berkaitan dengan diterapkannya kurikulum 2006 (KTSP) maka kurikulum keterampilan tersebut diadopsi ke dalam Kurikulum SMPN 22 Bandar Lampung.

SMPN 22 Bandar Lampung selain unggul dalam bidang keterampilan juga harus mampu bersaing dalam bidang akademik dan nonakademik dengan sekolah lainnya baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi. Untuk itu SMPN 22 Bandar Lampung bersama masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah membuat rancangan pengembangan sekolah dan kemajuan sekolah dengan tidak menghilangkan karakteristik sekolah plus (keterampilan) yang terjabar dalam kurikulum SMPN 22 Bandar Lampung dengan visi dan misi seperti yang terinci dalam Kurikulum SMPN 22 Bandar Lampung ini. Dengan penerapan Kurikulum SMPN 22 Bandar Lampung diharapkan menjadi sekolah unggulan dalam bidang keterampilan, bidang akademik dan nonakademik berlandaskan iman dan

takwa. Komponen Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Tujuan Pendidikan Sekolah
- b. Struktur dan Muatan Kurikulum
- c. Kalender Pendidikan
- d. Silabus
- e. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Adapun nama-nama kepala SMPN 22 Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- 1. Adenan Moehy Tahun 1992 s.d Tahun 1993
- 2. Drs. Faizal Iswara Tahun 1993 s.d Tahun 1996
- 3. Drs. Senan Widiyon Tahun 1996 s.d Tahun 1997
- 4. Ishak DUS Tahun 1997 s.d Tahun 2005
- 5. Malwani,S.Pd. Masa Transisi Tahun 2005 s.d Tahun 2006
- 6. Dra. Hj. Rita Ningsih, M.M. Tahun 2006 s.d Tahun sekarang.

2. Visi, Misi dan Tujuan SMPN 22 Bandar Lampung

a. Visi

Mewujudkan sekolah yang berprestasi, berketerampilan, berkualitas, berbudi pekerti luhur, dan peduli lingkungan dengan berlandaskan iman dan takwa.

Indikator:

1. Unggul dalam terwujudnya lingkungan belajar yang sehat, kondusif, dan inovatif
2. Unggul dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
3. Unggul dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah
4. Unggul dalam bidang akademik dan nonakademik
5. Unggul dalam prestasi olah raga dan seni
6. Unggul dalam pemanfaatan teknologi informasi
7. Unggul dalam pelaksanaan nilai-nilai dan ajaran keagamaan di sekolah
8. Unggul dalam mewujudkan perilaku akhlak mulia warga sekolah
9. Unggul dalam terwujudnya harmonisasi antarwarga sekolah
10. Unggul dalam terwujudnya harmonisasi warga sekolah dengan warga sekitar sekolah

b. Misi

1. Mewujudkan lingkungan belajar yang sehat, kondusif, dan inovatif
2. Memenuhi fasilitas sekolah yang berstandar nasional
3. Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar, dan adil
4. Memberdayakan potensi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkemampuan dan tangguh
5. Memberdayakan potensi kecerdasan peserta didik agar berdaya saing tinggi

6. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler
7. Melaksanakan kegiatan keagamaan dan pengamalan nilai dan ajaran keagamaan dalam kehidupan sehari-hari
8. Mengembangkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab
9. Membudayakan senyum, sapa, dan salam dalam pergaulan di lingkungan sekolah
10. Membina hubungan yang harmonis antara warga sekolah dengan warga sekitar lingkungan sekolah.

c. Tujuan

1. Menjalin kerja sama yang baik antarwarga sekolah dengan warga masyarakat
2. Memiliki KTSP sesuai dengan standar isi, standar kelulusan dan standar BSNP.
3. Seluruh guru memiliki perangkat pembelajaran lengkap
4. Meningkatkan mutu kelulusan dengan kenaikan rata-rata 0,05 setiap tahun
5. Mewujudkan lingkungan sekolah yang asri
6. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan UKS
7. Memiliki tenaga kependidikan dan pengajaran S1 minimal 92 %
8. Memberi kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti MGMP, pelatihan, seminar, dan kegiatan lain yang menunjang profesionalitasnya.

9. Menciptakan suasana sekolah yang religius
10. Mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan MGMP sekolah
11. Berprestasi dalam berbagai perlombaan sekurang-kurangnya juara harapan tingkat kota pada tahun 2012.
12. Memiliki koperasi guru dan karyawan yang layak pada tahun 2012.
13. Memiliki fasilitas laboratorium IPA, Bahasa dan multi media minimal 90% pada tahun 2012
14. Memiliki fasilitas olahraga minimal 75 % pada tahun 2012.
15. Memiliki buku pelajaran untuk KBM siswa minimal 75 % pada tahun 2012.
16. Memiliki papan berpetak minimal 1 buah setiap kelas pada tahun 2012
17. Memiliki peta dan globe sesuai dengan jumlah kelas pada tahun 2012.

B. Profil SMPN 2 Bandar Lampung

1. Sejarah SMPN 2 Bandar Lampung

SMPN 2 Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1995 dengan Surat Keputusan Pendirian Sekolah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor No. 3705/B.III/1995 tanggal 21 Juli 1955. Sekolah ini awalnya bernama SMPN 2 Tanjung Karang, kemudian sejak tahun 1977 beralih

menjadi SLTPN 2 Bandar Lampung dan sejak tahun 2004 berganti menjadi SMPN 2 Bandar Lampung.

SMPN 2 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang memiliki program percepatan atau biasa disebut dengan kelas akselerasi dimana peserta didik dapat menempuh masa didiknya hanya dalam waktu dua tahun. Hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi SMPN 2 Bandar Lampung untuk melahirkan siswa/i berbakat dalam kurun waktu yang singkat, sehingga SMPN 2 Bandar Lampung menjadi salah satu sekolah favorit di Provinsi Lampung dan menjadi rujukan bagi siswa/i berbakat yang ada di Provinsi Lampung. Sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) ini menerapkan sistem kurikulum 2013 yang mengedepankan akhlak dan aspek perilaku.

Selama rentang waktu hampir 50 tahun, kepemimpinan sekolah ini baru berganti sebanyak empat kali Kepala Sekolah. Adapun nama-nama kepala SMPN 22 Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. R. Prayitno Tahun 1955 s.d Tahun 1965
2. Murhan Yasin Tahun 1965 s.d Tahun 1992
3. Drs. Sukirman Tahun 1992 s.d Tahun 2002
4. Euis Tati Darnati, M.Pd. Tahun 2002 s.d Sekarang.

2. Visi, Misi dan Tujuan SMPN 2 Bandar Lampung

a. Visi

Unggul, kompetitif dan kolaboratif di era global berlandaskan iman dan takwa.

b. Misi

1. Mewujudkan lulusan yang berprestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional
2. Mewujudkan siswa dengan kemampuan non akademik yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
3. Mewujudkan lulusan yang cerdas, kompetitif, cinta tanah air, santun dan bertaqwa
4. Mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap, mutahir dan sesuai dengan tuntutan zaman
5. Mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan melalui pendekatan ilmiah
6. Mewujudkan fasilitas sekolah yang lengkap, relevan, dan berwawasan kedepan
7. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu, memiliki komitmen dan kompetensi tinggi
8. Mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang tangguh
9. Mewujudkan sistem penilaian autentik proses dan hasil belajar
10. Mewujudkan pembimbingan yang memadai, wajar dan adil sesuai dengan tuntutan pendidikan

11. Mewujudkan jalinan kerjasama dengan sekolah dan institusi lain di dalam dan luar negeri
12. Mewujudkan sekolah inovatif, kreatif dan dinamis
13. Mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, asri, bersih dan sehat

c. Tujuan

1. Terwujudnya pendidikan yang bermutu, efisien, dan relevan di era global
2. Terwujudnya sistem manajemen sekolah yang transparan, akuntabel, efektif dan partisipatif
3. Unggul dalam SDM sekolah, sarana prasarana, dan fasilitas sekolah
4. Unggul dalam prestasi akademik yang meliputi:
 - a. Unggul dalam pencapaian nilai ujian nasional
 - b. Unggul dalam berbagai lomba mata pelajaran/olimpiade mata pelajaran di tingkat nasional dan internasional
5. Unggul dalam prestasi non akademik yang meliputi:
 - a. Unggul dalam berbagai lomba kegiatan ekstra kulikuler
 - b. Unggul dalam imtaq dan budi pekerti

C. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terletak di Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Tanjung Karang Bandar Lampung. Kantor Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung yang dahulu disebut dengan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Karang Teluk Betung yaitu pada tahun 1976. Struktur organisasi pada saat itu sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0173/01/1983 tanggal 14 Maret 1983, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0363 / 0 / 1988 tanggal 20 Juli 1988 tentang perubahan keputusan Mendikbud RI Nomor : 0304/0/1984 yaitu pasal 82 butir 14.

Tahun 1983 Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Karang Barat Teluk Betung diubah menjadi Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya Daerah Tk 11 Bandar Lampung (lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, tambahan lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian pada tahun 1999 Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya Daerah Tingkat 11 Bandar Lampung diubah nama menjadi Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandar Lampung.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah dengan

didasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab antara lain mengundang konsekuensi adanya perubahan dasar dari sisi kelembangan di daerah, maka dipandang perlu menata susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung. Untuk diketahui bahwa pemberlakuan struktur organisasi Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung tersebut sejak diterbitkannya surat keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 8 Tahun 2001 Tanggal 1 Januari 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P & P Kota Bandar Lampung setelah terbitnya keputusan Walikota tersebut di atas, maka terjadi perubahan nama kantor yaitu Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandar Lampung berubah menjadi Kantor Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung .

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 05 Tahun 2008 Tanggal, 11 Februari 2008 Dinas Pendidikan dan Perpustakaan berubah menjadi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Namun, pada tahun 2016 terjadi perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 sehingga Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung berubah nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Perubahan Nomenklatur tersebut berlaku mulai 1 Januari 2017 sejalan dengan penambahan bidang yakni Bidang Kebudayaan dan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Non Formal.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Visi pendidikan di Kota Bandar Lampung adalah terwujudnya pendidikan berkualitas dan terjangkau dengan dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai IPTEK dan berdaya saing.

Visi tersebut merupakan upaya untuk mendorong pendidikan di Kota Bandar Lampung berkualitas dan terjangkau untuk menjadi yang unggul dan mengantarkan masyarakat Bandar Lampung untuk siap bersaing dalam menghadapi pasar bebas dengan sumber daya manusia yang dilandasi iman dan taqwa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian wawasan peningkatan daya saing dan keunggulan dengan meningkatkan kesejahteraan dan ketaqwaan masyarakat merupakan upaya menyeluruh (comprehensive) yang didukung pembangunan pendidikan dan kebudayaan sehingga pada akhirnya meningkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

b. Misi

Adapun misi dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Mewujudkan perluasan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan.

2. Meningkatkan kualitas SDM yang menguasai iptek, unggul dan berstandar nasional/internasional
3. Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan yang memiliki keterampilan, unggul dan berdaya saing
4. Mengembangkan jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal

3. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusanpemerintah daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok

tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, membina dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dievaluasi berdasarkan *input* memperoleh hasil yaitu sebanyak 60 responden memiliki skor antara 8 – 10 dengan presentase sebesar 72,28% masuk dalam kategori positif karena responden beranggapan jika anggaran yang diberikan pemerintah sudah memadai untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan. Sedangkan sebanyak 23 responden memiliki skor antara 5–7 dengan presentase sebesar 27,72% masuk dalam kategori negatif karena responden beranggapan jika penetapan kuota penerimaan peserta didik bina lingkungan tidak efektif dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Sehingga Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dari segi *input* belum sepenuhnya tercapai.
2. Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dievaluasi berdasarkan proses kebijakan memperoleh hasil yaitu sebanyak 69 responden memiliki skor antara 16 – 22 dengan presentase sebesar 83,13% masuk

dalam kategori positif. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dari segi evaluasi proses kebijakan sebagian besar sudah tercapai dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan sebanyak 14 responden memiliki skor antara 10 – 15 dengan presentase sebesar 16,87% masuk dalam kategori negatif karena responden beranggapan jika proses dalam mencapai tujuan kebijakan belum efektif karena masih banyak terjadi permasalahan, sehingga Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dari segi proses belum sepenuhnya tercapai.

3. Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dievaluasi berdasarkan *output* kebijakan memperoleh hasil yaitu sebanyak 48 responden memiliki skor antara 25 – 32 dengan presentase sebesar 57,84% masuk dalam kategori positif. Hal tersebut membuktikan bahwa implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dari segi evaluasi *output* kebijakan sebagian besar menghasilkan *output* yang baik. Namun, sebanyak 35 responden memiliki skor antara 17 – 24 dengan presentase sebesar 42,16 masuk dalam kategori negatif karena belum memenuhi indikator efektivitas disebabkan karena mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung khususnya di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung menurun semenjak diselenggarakan Program Bina Lingkungan serta pencapaian kuota penerimaan peserta didik bina lingkungan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Perda No 01 Tahun 2012, sehingga Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dari segi *output* belum sepenuhnya tercapai.

4. Faktor penyebab belum tercapainya Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dari segi *input* disebabkan oleh penetapan kuota penerimaan peserta didik bina lingkungan yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan Perda Nomor 01 tahun 2012 yaitu sebesar 30%. Dasar yang mengatur mengenai kuota penerimaan peserta didik bina lingkungan justru mengacu pada Perwali Nomor 49 tahun 2013.
5. Faktor penyebab belum tercapainya Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dari segi proses disebabkan karena pada prosesnya tidak efektif karena banyak terjadi permasalahan dalam proses implementasi kebijakan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah *input* peserta didik yang tidak melalui seleksi membuat guru kesulitan dalam mendisiplinkan serta menjelaskan materi karena motivasi belajar peserta didik masih rendah serta penetapan penerimaan dengan kuota sebesar 50% bahkan mencapai 70% menyebabkan terancamnya eksistensi sekolah swasta karena sekolah swasta kesulitan untuk mendapatkan calon peserta didik.
6. Faktor penyebab belum tercapainya Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan dari segi *output* disebabkan karena pencapaian kualitas mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung khususnya di SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar Lampung tidak efektif disebabkan karena mutu pendidikan mengalami penurunan semenjak diselenggarakannya Program Bina Lingkungan dan pencapaian kuota penerimaan peserta didik tidak efektif karena terjadi tumpang tindih regulasi dimana penentuan kuota penerimaan tidak sesuai dengan Perda

No 1 tahun 2012 yaitu sebesar 30% melainkan pada kenyataannya kuota penerimaan peserta didik bina lingkungan justru mengacu pada Perwali No 49 Tahun 2013 yaitu sebesar 50%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis terhadap permasalahan Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Agar Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan tercapai dari segi *input*, sebaiknya penetapan kuota penerimaan peserta didik bina lingkungan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan karena kedudukan peraturan daerah lebih tinggi daripada peraturan walikota.
2. Agar Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan tercapai dari segi proses, sebaiknya proses perancangan dan perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak hanya mengutamakan kuantitas namun juga harus mempertimbangkan kualitas serta dampak yang akan ditimbulkan dalam jangka panjang.
3. Agar Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan tercapai dari segi *output*, sebaiknya diadakan seleksi/tes masuk pada penerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan calon peserta didik di tingkat dasar agar menjaga mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, agar pencapaian kuota penerimaan sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi tumpang

tindih regulasi, seharusnya Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ke DPRD Kota Bandar Lampung berkaitan dengan penambahan jumlah kuota penerimaan peserta didik jalur bina lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto Suharsimi, 2000. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fischer, F., G. J. Miller, M. S. Sidney. 2007. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. CRC Press, London.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian kualitatif*. Salemba Humanika: Yogyakarta
- Hill, M. and P. Hupe. 2002. *Implementing Public Policy*. SAGE Publications. London.
- Irianto, Y. B. 2011. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep Teori dan Model*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kerlinger, F. N. 1973. *Foundations of Behavioral Research*. Holt Rinehart and Winston INC, New York.
- Mack, N., C. Woodsong, K. M. MacQueen, G. Guest, E. Namey. 2005. *Qualitative Research Methods: a Data Collector's Field Guide*. Family Health International, North California USA.
- Masyhuri dan Zainuddin. 2011. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Ndraha, T. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Peters, B. G. and J. Pierre. 2006. *Handbook of Public Policy*. SAGE Publications, London.

- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siregar, Ir. Syofian, M.M. 2013. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Syafiie, I. K. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Tangkilisan, H. N. S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yayasan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset, Yogyakarta
- UNESCO Bangkok. 2005. *Handbook of Desentralized Education Planning*. UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Bangkok.
- Wahab, S. A. 2016. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. BukuSeru, Yogyakarta.

Skripsi:

- Bunga Janati (2014) “Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan Kota Bandar Lampung”
- Dian Risnawati (2016) “Respon Pemangku Kepentingan Terhadap Implementasi Kebijakan Jalur Bina Lingkungan (Studi Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2015 di SMAN 2 dan SMAN 9 Kota Bandar Lampung)”

Jurnal:

- Alfi Wira Pratama “Efektivitas Program bilingpada Masyarakat Nelayan Kelurahan Kota Karang Raya Kota Bandar Lampung” Vol. 17, No. 2: 77- 88
- Aminuddin Bakry (2010) “Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik” Vol. 2, No. 1, April 2010
- Mujianto Solichin (2015) “Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi” Vol. 6, No. 2, Oktober 2015: 148-178

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Sumber Lain:

<http://www.harianpilar.com/2015/06/22/program-bina-lingkungan-biling-langgar-perda/>, diakses pada 3 September pukul 11.25

<http://www.harianpilar.com/2015/06/23/program-bina-lingkungan-picu-meningkatnya-angka-kemiskinan/>, diakses pada 4 September 2016 pukul 17.00

<http://lampung.tribunnews.com/2015/06/13/waduh-27-siswa-berduit-daftar-jalur-bina-lingkungan>, diakses pada 13 Desember 2016 pukul 15.20

<http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=kawasan&i=10648>, diakses pada 3 September 2016 pukul 13.48

<https://bandarlampung.siap-ppdb.com/>, diakses pada 1 September 2016 pukul 18.45